

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN PADA SAAT UNJUK RASA OLEH APARAT KEPOLISIAN DALAM KONTEKS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Timur Tumanggor*

Penelitian ini mengkaji aspek yuridis penggunaan kekerasan oleh aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi di Indonesia dari perspektif hak asasi manusia, yang dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan antara kewajiban menjaga ketertiban dan kewajiban melindungi hak asasi warga negara dalam aksi unjuk rasa. Demonstrasi merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU No. 9/1998, namun sering kali terjadi insiden kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM. Penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis peran polisi dalam menegakkan hukum sekaligus melindungi HAM, mengkaji mekanisme penegakan hukum terhadap aparat yang menggunakan kekuatan berlebihan, dan mengidentifikasi standar-standar HAM yang harus ditaati. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan kombinasi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis, dengan data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara kerangka hukum dan implementasi di lapangan, lemahnya mekanisme akuntabilitas, dan terbatasnya lembaga pengawasan. Kesimpulannya, polisi berperan ganda sebagai penegak hukum dan pelindung HAM sesuai dengan UU No. 2/2002 dengan tantangan dalam implementasi praktisnya; mekanisme penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang belum optimal meskipun telah tersedia tiga jalur penegakan hukum; dan standar HAM yang harus ditaati meliputi penghormatan terhadap kebebasan berekspresi, pendekatan tanpa kekerasan, serta asas legalitas, nesalitas, dan proporsionalitas dengan kewajiban menerapkan tahapan penggunaan kekuatan secara bertahap.

Kata Kunci : Kepolisian, Kekerasan, Unjuk Rasa, Pelanggaran HAM

*Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE USE OF VIOLENCE DURING DEMONSTRATIONS BY POLICE OFFICERS IN THE CONTEXT OF HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN INDONESIA

Timur Tumanggor*

This study examines the juridical aspects of the use of force by police officers in handling demonstrations in Indonesia from a human rights perspective, which is motivated by the tension between the duty to maintain order and the obligation to protect the human rights of citizens during demonstrations. Demonstrations are a constitutional right guaranteed by the 1945 Constitution and Law No. 9/1998, but there are often violent incidents that lead to human rights violations. This study aims to: analyze the role of the police in enforcing the law while protecting human rights, examine law enforcement mechanisms against officers who use excessive force, and identify human rights standards that must be obeyed. The method used is a normative juridical approach with a combination of statutory, conceptual, and analytical approaches, with data collected through literature study. The results showed a gap between the legal framework and implementation in the field, weak accountability mechanisms, and limited oversight institutions. In conclusion, the police play a dual role as law enforcers and human rights protectors in accordance with Law No. 2/2002 with challenges in practical implementation; law enforcement mechanisms against abuse of authority are not optimal despite the availability of three enforcement channels; and human rights standards that must be adhered to include respect for freedom of expression, a non-violent approach, as well as the principles of legality, necessity, and proportionality with the obligation to apply graduated stages of the use of force.

Keywords: Police, Violence, Demonstrations, Human Rights Violations

*Graduate Student of Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra